



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat. Serta kewajiban Pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terbebas dari informasi yang sesat dan menyimpang.



Dalam era konvergensi media, dimana arus informasi menjadi tidak dapat dibendung lagi, banyak kanal yang memungkinkan masyarakat untuk terpapar informasi. Bahkan setiap bagian dari masyarakat bisa menjadi sumber informasi atau yang sekarang dikenal dengan istilah citizen journalism. Dalam era digitalisasi dan media sosial, tidak hanya akun yang memiliki kredibilitas yang bisa menyusun narasi terkait kejadian tertentu, namun akun-akun anonim juga memiliki keleluasaan yang sama untuk menerbitkan tulisan dengan tema yang sedang diperbincangkan.



Salah satu kekuatan media lainnya yang harus diwaspadai oleh pemerintah adalah share informasi dengan hanya sekali klik. Informasi dapat dengan mudah menyebar dari satu lini massa ke lini massa lainnya hanya dengan menekan tombol forward. Celakanya, tidak semua penerima informasi tersebut membaca

informasi dengan seksama, banyak pula yang hanya membaca sebagian namun meneruskan informasi tersebut begitu saja.

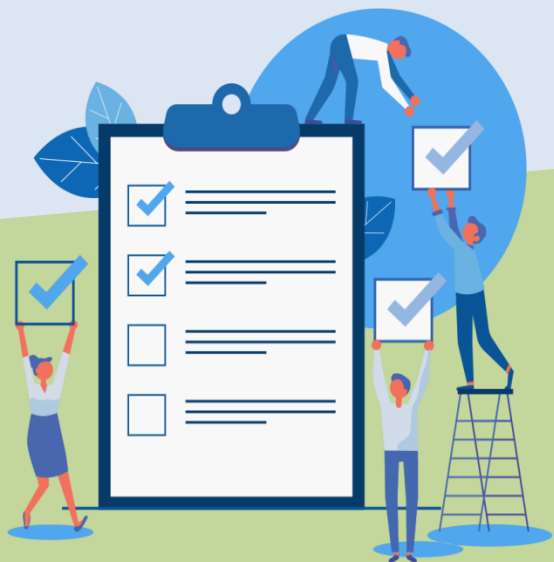
Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Dalam Negeri juga telah menghimpun masukan dan saran dari Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui berbagai kegiatan kolaborasi yang dilakukan selama tahun 2019. Hasil dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dimaksud salah satunya adalah usulan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 khususnya yang mengatur tentang struktur PPID dan tandar prosedur operasional Layanan Informasi. Revisi Permendagri No. 3 Tahun 2017 tersebut akan diselaraskan dengan Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang sedang dibahas.

Sehingga dapat menghasilkan aturan yang digunakan sebagai pedoman baik bagi Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah.





Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

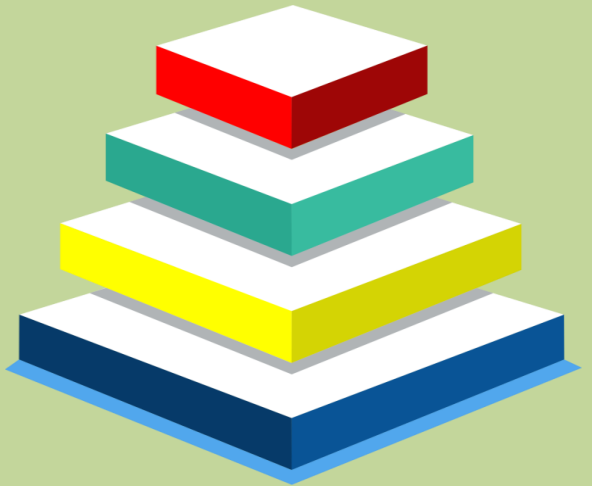
Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PPID Utama dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan. PPID Utama bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang berada di Komponen Kerja Kemendagri sebagai pihak yang menguasai informasi.

Susunan dan Kedudukan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.05-2039 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Pembina;
2. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
3. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

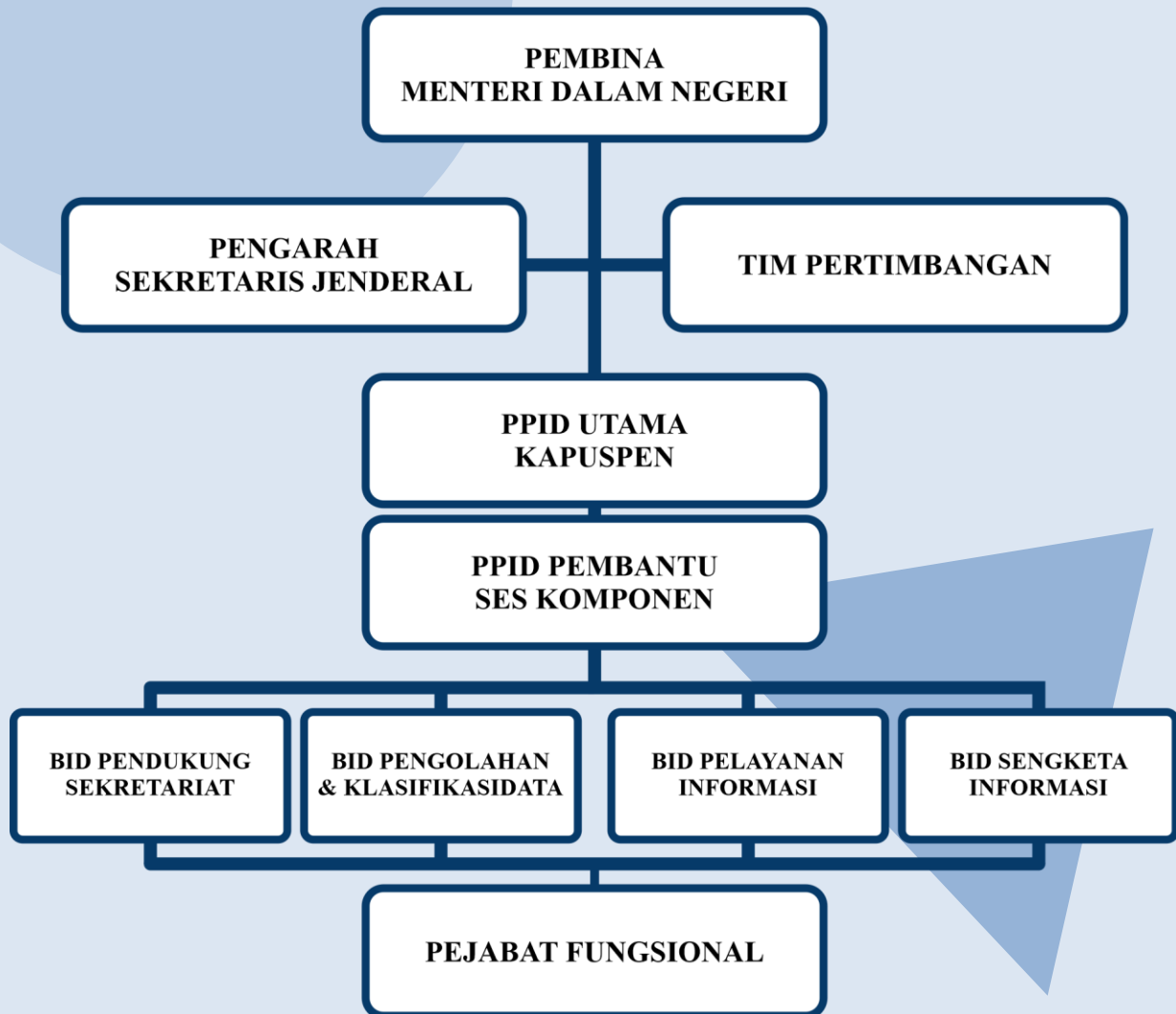


Struktur Organisasi PPID Kementerian Dalam Negeri menempatkan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina PPID, Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID, Pejabat Eselon I dari setiap komponen di Kementerian Dalam Negeri beserta dengan Kepala Biro Hukum sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Pusat Penerangan sebagai PPID Utama dan Sekretaris setiap komponen dan unit Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Pembantu dimana masing-masing komponen memiliki Person in charge (PIC) sebagai pelaksana fungsional yang mengoperasionalkan administrasi bisnis pelayanan informasi publik sebagai admin aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri yang aktif.



Dalam rangka menjalankan fungsi teknis, PPID Utama berperan dalam proses konsultasi, koordinasi serta evaluasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, disamping berkoordinasi dengan atasan PPID. PPID Utama dan Pembantu berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam proses pengklasifikasian informasi, utamanya proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Untuk lebih memahami alur koordinasi dan struktur PPID pada Kementerian Dalam Negeri, Berikut digambarkan bagan Struktur Organisasi PPID di Kementerian Dalam Negeri.



Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Semua permohonan informasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung telah diakomodir sedemikian rupa agar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:



1. **Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik** untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruangannya dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
a. 4 Kursi Tamu, b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi, c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet, d. 2 unit telepon, e. 2 lemari arsip, f. 1 filling cabinet, g. Dan perlengkapan registrasi dan perkantoran standar lainnya.
2. **Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung**, melalui telepon/fax 021-384322 dan juga e-mail: ppid@kemendagri.go.id
3. **Portal/ website PPID Kementerian Dalam Negeri** yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <https://ppid.kemendagri.go.id>

Jumlah Permohonan Informasi

Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pemohon informasi baik yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri maupun yang mengajukan permohonan informasi secara langsung. Pelayanan permohonan informasi secara langsung dilakukan oleh petugas di meja layanan dan konsultasi PPID Kementerian Dalam Negeri. Sementara permohonan informasi yang dilakukan melalui aplikasi dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2019, PPID Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pelayanan informasi secara tidak langsung kepada 256 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 256 pemohon informasi yang menyampaikan informasi melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id.



Selain melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id, PPID Kementerian Dalam Negeri juga memberikan pelayanan secara langsung melalui meja layanan yang terletak di gedung B Lantai 1 Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat.

PPID Kementerian Dalam Negeri melayani baik permohonan informasi oleh individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perwakilan Pemerintahan Daerah dengan setiap pemohon informasi terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan registrasi ke Unit Layanan Administrasi (ULA) dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Selama tahun 2019 PPID Kementerian Dalam Negeri Telah melayani sebanyak 44 perwakilan Pemerintah Daerah yang memohon informasi sekaligus asistensi kepada petugas layanan informasi di Kementerian Dalam Negeri.



**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri
selama Tahun 2019**

NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	AKSES
1	Ivandy Permana	1 Januari 2019	Data Jumlah Penduduk Kab Dairi Tahun 2019 serta Data Perekaman dan Pencetakan e-KTP (Kalau belum ada tahun 2019 boleh menggunakan data yang terbaru)	website
2	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman	website
3	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul	website
4	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gunung Kidul	website
5	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo	website
6	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Agam	website
7	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Badung	website
8	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bandung Barat	website
9	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangkalan	website
10	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyumas	website
11	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi	website
12	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Batang	website
13	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Blitar	website
14	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Blora	website
15	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bojonegoro	website
16	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bondowoso	website
17	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Boyolali	website

18	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Brebes	website
19	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buleleng	website
20	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo	website
21	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ciamis	website
22	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cianjur	website
23	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cilacap	website
24	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cirebon	website
25	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Deli Serdang	website
26	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Demak	website
27	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Garut	website
28	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gianyar	website
29	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gorontalo	website
30	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Grobogan	website
31	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Indramayu	website
32	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jember	website
33	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara	website
34	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jombang	website
35	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kampar	website
36	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karanganyar	website
37	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karangasem	website
38	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal	website

			Kabupaten Kebumen	
39	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kediri	website
40	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal	website
41	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten	website
42	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus	website
43	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kuningan	website
44	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lamongan	website
45	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lampung Selatan	website
46	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lampung Tengah	website
47	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lampung Timur	website
48	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lampung Utara	website
49	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Langkat	website
50	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak	website
51	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lombok Barat	website
52	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lombok Tengah	website
53	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lombok Timur	website
54	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lumajang	website
55	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Madiun	website
56	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang	website
57	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan	website
58	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka	website

59	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Malang	website
60	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Mojokerto	website
61	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk	website
62	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ngawi	website
63	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan	website
64	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pamekasan	website
65	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pandeglang	website
66	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pangandaran	website
67	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pati	website
68	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pekalongan	website
69	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pemalang	website
70	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ponorogo	website
71	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pringsewu	website
72	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Probolinggo	website
73	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purbalingga	website
74	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purwakarta	website
75	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo	website
76	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rejang Lebong	website
77	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rembang	website
78	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hilir	website
79	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal	website

			Kabupaten Sampang	
80	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Semarang	website
81	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Serang	website
82	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Simalungun	website
83	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Situbondo	website
84	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sragen	website
85	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Subang	website
86	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukabumi	website
87	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten sukoharjo	website
88	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang	website
89	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumenep	website
90	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanah Datar	website
91	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tasikmalaya	website
92	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tegal	website
93	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung	website
94	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Trenggalek	website
95	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tuban	website
96	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tulungagung	website
97	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonogiri	website
98	Biizni Putri Bengi	2 Januari 2019	Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonosobo	website
99	Hendra Rizki Rangkuti	3 Januari 2019	Realisasi Dana Desa Pemerintahan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten	website

			Padang Lawas Sumatera Utara ta 2016,2017,2018	
100	Hendra Rizki Rangkuti	3 Januari 2019	Laporan Realisasi APBD Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara ta 2016, 2017 dan 2018	website
101	Faslan Syam Sajiah	17 Januari 2019	Data Alokasi Belanja Urusan Kesehatan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia untuk TA 2010 sd. TA 2019	website
102	MUJIBUR RAHMAN	19 Januari 2019	Regulasi desa	website
103	Arvixi bonte namad	25 Januari 2019	Pengaduan ektp	website
104	Anwar	28 Januari 2019	Permohonan pendaftaran akte kelahiran	website
105	Widodo	28 Januari 2019	permohonan informasi berupa salinan softcopy	website
106	Fuad Mushofa	30 Januari 2019	Data Organisasi Masyarakat/LSM yang terdaftar di Kemendagri terbaru	website
107	Adya Imanina	30 Januari 2019	Surat Pemberitahuan Penelitian	website
108	M riansyah	31 Januari 2019	Kartu keluarga	website
109	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	1 Februari 2019	Permohonan Aplikasi	website
110	Meilani Damayanti Kitnarita Purba	6 Februari 2019	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	website
111	Yan magdalena	7 Februari 2019	Standar pelayanan minimal bidang sosial tahun 2016 dan 2017	website
112	Yan magdalena	7 Februari 2019	Laporan capaian realisasi standar pelayanan minimal sosial tahun 2016 dan 2017 kabupaten lampung selatan, timur, tengah, utara dan pringsewu	website
113	RATNA NINGSIH	8 Februari 2019	EKPD terhadap LPPD 2011-2017	website
114	RATNA NINGSIH	8 Februari 2019	EKPD terhadap LPPD 2011-2017	website
115	Rafik Wardhana	11 Februari 2019	sambutan mendagri pada RAKERNAS PEMBEKALAN	website

			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS UNTUK MENDUKUNG PEMILU 2019	
116	NURJAMIIN ANSORI	11 Februari 2019	e KTP belum selesai	website
117	Rafik Wardhana	11 Februari 2019	sambutan Mendagri untuk apel BKO penyerahan Linmas ke POLRI dalam Pemilu 2019	website
118	Rafik Wardhana	11 Februari 2019	sambutan mendagri pada RAKERNAS PEMBEKALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS UNTUK MENDUKUNG PEMILU 2019	website
119	SIGIT WIDIYONO	11 Februari 2019	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar PNS	website
120	Yan magdalena	11 Februari 2019	Laporan capaian realisasi standar pelayanan minimal sosial tahun 2016 dan 2017 kabupaten buleleng, bangli, badung, karang asem, gianyar, deli serdang, langkat, simalungun, lombok barat, lombok tengah, lombok timur	website
121	Fuad Mushofa	13 Februari 2019	Data Organisasi Masyarakat/LSM yang terdaftar di Kemendagri terbaru	website
122	rizky tri ramadhani	14 Februari 2019	nomor 57 tahun 2010 tentang pedoman standar pelayanan perkotaan	website
123	Hendra Rizki Rangkuti	15 Februari 2019	LKPJ LAKIP DAN LPPD KAB PADANG LAWAS 2017, 2018	website
124	Ari Supriadi	17 Februari 2019	APBD Kab/Kota se-Provinsi Banten	website
125	Ahmad Ulil Aedi, S.H., M.H	18 Februari 2019	Permintaan Informasi Publik terkait dengan Dasar Hukum mutasi SPPT PBB	website
126	Rafik Wardhana	20 Februari 2019	sambutan	website
127	Hariadi	25 Februari 2019	Pengaktifan nik dan kk	website
128	Jennifer	28 Februari	Daftar kabupaten/kota per tahun	website

	Frentasia	2019	(2009-2018)	
129	Mulia Aisyah Krifei	5 Maret 2019	Masyarakat Adat di Indonesia	website
130	maulana ibna azkiya	7 Maret 2019	Jumlah Komunitas yang ada di Indonesia	website
131	siti zubaidah	8 Maret 2019	untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan UU NO 14 2018	website
132	M.jefrizal solihin	10 Maret 2019	Disiplin kerja disnaker kota pekanbaru	website
133	Ilham Firdaus	12 Maret 2019	intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995, Tanggal 21 Agustus 1995	website
134	Ilham Firdaus	12 Maret 2019	Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 September 1995 Nomor 050/623/a.3/IJ	website
135	Hendra Rizki Rangkuti	13 Maret 2019	LKPJ LAKIP DAN LPPD KAB PADANG LAWAS 2017, 2018	website
136	Rezki Septiyadi	15 Maret 2019	Data Kepala Keluarga dan anggota keluarga kecamatan gunung putri kelurahan bojong kulur kabupaten bogor jawa barat	website
137	Eko Mardiatno	18 Maret 2019	Pertaturan Perda Syariah	website
138	Waninda	4 April 2019	Data Keanggotaan DPRD Kabupaten Kota Se Indonesia tahun 2009-2014	website
139	Alda Awwalil Hasani	5 April 2019	Surat Dirjen Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	website
140	anita safitri	6 April 2019	Hasil Persentase Kinerja pegawai disdukcapil kota bekasi 2016-2018	website
141	RONAL EFENDI	10 April 2019	pengaduan	website
142	Mohamad Rifain	18 April 2019	Renstra Kabupten Tojo Unauna	website
143	RATNA NINGSIH	20 April 2019	EKPPD terhadap LPPD 2017	website
144	Choirul hudah	21 April 2019	Surat Edaran Mendagri No 141/3552/59 Tahun 2017.	website
145	Rilau Abdalla	23 April 2019	Keputusan Mendagri no.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan	website
146	Alda Awwalil Hasani	25 April 2019	Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 15526/DUKCAPIL tanggal 31 Agustus Nomor 2018 tentang	website

			Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
147	ELFAN MAULANA	28 April 2019	Cek data terdaftar nik ktp	website
148	NUR SYAHKTI MALA SARI	1 Mei 2019	Kecamatan Babulu Dalam Angka 2019	website
149	Ira Sugarsih	2 Mei 2019	keputusan menteri ekppd terhadap LPPD TA 2017	website
150	ABD. BASITH	3 Mei 2019	PERMOHONAN DATA SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI TENTANG PEMBATALAN PERDA/PERKADA DAN PERMENDAGRI	website
151	siti husnul khotimah	4 Mei 2019	no kartu keluarga	website
152	Ujang syaripudin	8 Mei 2019	Cek nik ektp kk	website
153	Aripiyanto	9 Mei 2019	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018	website
154	Zamil Hadi	9 Mei 2019	Tata Air	website
155	Aripiyanto	10 Mei 2019	Mohon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.	website
156	ABD. BASITH	11 Mei 2019	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018	website
157	Fitri cahya ningrum	11 Mei 2019	Survey kepuasan pelanggan	website
158	M Rohman	15 Mei 2019	Blangko e-KTP	website
159	Aripiyanto	15 Mei 2019	DPA Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Tanjungbalai	website
160	ABD. BASITH	16 Mei 2019	PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI TENTANG PEMBATALAN/REVISI PERDA/PERKADA DAN PERMENDAGRI TAHUN 2016	website
161	ABD. BASITH	17 Mei 2019	PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI TENTANG PEMBATALAN/REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG	website

			PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO	
162	ABD. BASITH	25 Mei 2019	PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI TENTANG PEMBATALAN/REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO	website
163	Ilham Firdaus	29 Mei 2019	Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 September 1995 Nomor 050/623/a.3/IJ	website
164	Ilham Firdaus	29 Mei 2019	intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995, Tanggal 21 Agustus 1995	website
165	Ridha Taqoballah	31 Mei 2019	Keberatan atas Informasi	website
166	Ridha Taqoballah	31 Mei 2019	Keberatan atas Keterlambatan Informasi Publik	website
167	Joko Waluyo	18 Juni 2019	Surat	website
168	pepi magda shinthia	18 Juni 2019	Biometrik e-KTP	website
169	Ahmad Rayhan	19 Juni 2019	Naskah Akademik PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA	website
170	pepi magda shinthia	20 Juni 2019	jaringan e-KTP	website
171	VINA NURAI SYAH	22 Juni 2019	Data ektp	website
172	Jumadi	22 Juni 2019	Pengajuan untuk menjadi PPPK	website
173	Tri Nurlaila	26 Juni 2019	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Secara Nasional Atas LPPD Tahun 2017	website
174	Lisnawati Saragih	27 Juni 2019	No kartu keluarga	website
175	JOSIA VALERIO SIMANJUNTAK	27 Juni 2019	Nomor KK	website
176	pepi magda shinthia	28 Juni 2019	Data cetak e ktp di surabaya tahun 2015-2019	website

177	Arya sunanta	3 Juli 2019	Data rekaman id ktp	website
178	Dony Halomoan Siregar	3 Juli 2019	Permintaan Informasi	website
179	Shopa Dilla Aulia Tarigan	6 Juli 2019	Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	website
180	Shopa Dilla Aulia Tarigan	6 Juli 2019	Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	website
181	Meidya Putri	10 Juli 2019	SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	website
182	robby ilham sembiring	13 Juli 2019	32012***02980000	website
183	robby ilham sembiring	13 Juli 2019	NIK tidak terdaftar	website
184	Bagiar Adla Satria	16 Juli 2019	RPJMD Deli Serdang 2014-2019	website
185	RAMADAN HASIBUAN	16 Juli 2019	daftar nama desa kelurahan kecamatan kabupaten kota se indonesia	website
186	Arya sunanta	18 Juli 2019	Cetak e-KTP yang hilang	website
187	FIRDAUS, SE	22 Juli 2019	PPID UTAMA	website
188	Ira Sugiarsih	23 Juli 2019	Daftar Pemerintah Daerah yang penetapan APBDnya tidak tepat waktu Tahun 2009-2018	website
189	M.Erwin Aulia Rahman	25 Juli 2019	Nama orang tua	website
190	Beni	25 Juli 2019	Fisik KTP dgn Online Beda tanggal lahir	website
191	marris stela litasari	25 Juli 2019	Surat nomor 100/2390/Bangda tanggal 24 Mei 2019 hal : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah	website
192	nieco aditya	26 Juli 2019	Penggantian Data Kependudukan	website
193	WAHYUDI	30 Juli 2019	Kartu Keluarga	website
194	Eky Aprilianto	3 Agustus 2019	Nomer kartu keluarga	website
195	Dr. Mohamad Khoiru Rusydi	8 Agustus 2019	SE Menteri Dalam Negeri Nomor.981/1011/SJ/2019 Tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah	website
196	Jayanto	11 Agustus 2019	Permohonan Informasi Publik Kab. Luwu. Prov. sul.Sel	website
197	Indra Bayu Saputra	12 Agustus 2019	KARTU KELUARGA	website

198	heni heriyani	27 Agustus 2019	prosedur pembuatan kartu keluarga kota bogor	website
199	hermanto	30 Agustus 2019	Format Laporan Dinamika Hukum Strategis pada Pemerintah Daerah	website
200	Vira Maulina	2 September 2019	Implementasi Transaksi Non Tunai	website
201	dyah purwanti	2 September 2019	Perda APBD	website
202	Curtis Morrill	3 September 2019	Village election data	website
203	ENOS DANO	4 September 2019	Pemda pengguna Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	website
204	Ainal Jaya	4 September 2019	SDM Peneliti Balitbangda Provinsi Lampung	website
205	Thareq Akmal Hibatullah	5 September 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keranggan Kelurahan Setu Tangerang Selatan	website
206	ABDUL RAHMAN	15 September 2019	dmin dukcapil tebo	website
207	Afriani	15 Oktober 2019	Konsultasi terkait tupoksi Layanan Informasi	website
208	Fahmi	16 Oktober 2019	Koordinasi terkait Qanun keterbukaan informasi publik	website
209	Nisa Erma Fitriana	17 Oktober 2019	Permohonan Data	website
210	Jordi Adrian Syach	18 Oktober 2019	Nomor Kartu Keluarga	website
211	WAYAN WIANADA	24 Oktober 2019	formasi CPNS di Provinsi Kalimantan Utara	website
212	Agung aji wahyudi	26 Oktober 2019	nfo rincian formasi cpns prov Bengkulu dan kabupaten seprovinsi Bengkulu 2019	website
213	Muhammad julianto putra	26 Oktober 2019	RAPBD DKI JAKARTA 2020	website
214	Rudi Setiawan	27 Oktober 2019	Nik KTP 140804060***0005	website
215	Dadang Batra Sunda Wijaya	27 Oktober 2019	Mohon SURAT KETERANGAN DAN PENJELASAN tentang STATUS HUKUM PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI EMPAT LAWANG	website
216	Burhanudin	30 Oktober 2019	Konsultasi terkait Kebijakan PPID dan Aplikasi PPID	website

217	HERMADI	30 Oktober 2019	bimtek/pelatihan	website
218	Ardiyanto Rawa	30 Oktober 2019	Permohonan aplikasi PPID	website
219	Sjukri Hala	30 Oktober 2019	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/387/SJ Tahun 2018	website
220	ayodhea cassandra toisuta	30 Oktober 2019	neraca, daftar aset tetap dan catatan atas laporan keuangan provinsi jambi	website
221	ayodhea cassandra toisuta	30 Oktober 2019	laporan keuangan provinsi	website
222	Ardiyanto Rawa	1 November 2020	Permohonan aplikasi PPID	website
223	Ramadhany	4 November 2020	l ktp dan soft foto el ktp	website
224	FAHMI PRAYOGA	4 November 2020	Kawasan Timur Indonesia	website
225	Adela Endah Febriani	5 November 2020	Konsultasi Terkait PPID Utama	website
226	AGA NANDA EKO PUTRA	5 November 2020	CEK DATA E-KTP	website
227	Rina Maya Sari	9 November 2020	Cek nik	website
228	Aripiyanto	10 November 2020	Laporan Realisasi Anggaran Dak Fisik Tahun 2018.	website
229	GANDI SENTAJO PITARDJO	12 November 2020	Permintaan informasi legis pasport	website
230	Priesty Dyah Arini	13 November 2020	Data E-KTP	website
231	Yoes Chandra Kenawas	13 November 2020	Daftar Hasil Pemilu Kepala Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Tahun 2005 sampai 2013	website
232	Yupi	14 November 2020	Cabut berkas Pindah Penduduk	website
233	Mu'tashim Al Qoyyim	14 November 2020	Jumlah SKPD per Kabupaten/Kota di Indonesia	website
234	Rizal Mutaqin	16 November 2020	LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SIMALUNGUN LIMA TAHUN TERAKHIR	website

235	Dian Saraswati	18 November 2020	renstra	website
236	MUHLIS	20 November 2020	Buku Kode Etik ASN Lengkap	website
237	MUHLIS	14 November 2020	Laporan Inspektorat Kabupaten Buton	website
238	MUHLIS	20 November 2020	Laporan Keuangan Dana Desa Kabupaten Buton Selatan Sultra TA. 2018	website
239	MUHLIS	20 November 2020	Laporan Inspektorat Kota Baubau TA. 2018	website
240	Admin Kabupaten Banggai Kepulauan	20 November 2020	JUKNIS PENAMAAN SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	website
241	Heru	21 November 2020	surat dirjen politik dan pemerintahan umum nomor 213/074/polpum tertanggal 7 januari 2019.	website
242	Qiaunita Raudatul Jannah	22 November 2020	surat keputusan kepala daerah kota/kabupaten se indonesia tentang penetapan APBD	website
243	Qiaunita Raudatul Jannah	24 November 2020	Daftar kabupaten/kota di indonesia yang mengalami keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2015-2019	website
244	Krisna	26 November 2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2016	website
245	Heru	27 November 2020	surat dirjen politik dan pemerintahan umum nomor 213/074/polpum tertanggal 7 januari 2019.	website
246	muhammad sirat zailani	27 November 2020	mohon untuk dikirimkan informasi tentang kartu keluarga	website
247	Qiaunita Raudatul Jannah	29 November 2020	penetapan perda APBD tentang APBD TA.2017, TA. 2018 dan TA.2019 provinsi se indonesia	website
248	Moh. Farid Ariyanto	3 Desember 2019	Pengumuman tentang indeks inovasi daerah	website
249	clara irvina ryan	5 Desember 2019	data BPS KOTA PEKANBARU DALAM ANGKA 2019	website
250	LATIPAH	7 Desember 2019	LAPANGAN KERJA 17 SEKTOR	website
251	Dindo Bastia	9 Desember	Permohonan Aplikasi PPID	website

		2019		
252	siti radila	15 Desember 2019	Daftar Badan Usaha Di Kota Tebing Tinggi	website
253	Irham Fuadi	19 Desember 2019	Data total Anggaran Kesehatan per Provinsi tahun 2017 dan 2018	website
254	melia larassati	21 Desember 2019	Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan Tahun 2013-2018 serta Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat.	website
255	muhammad sirat zailani	27 November 2020	mohon untuk dikirimkan informasi tentang kartu keluarga	website
256	Qiaunita Raudatul Jannah	29 November 2020	penetapan perda APBD tentang APBD TA.2017, TA. 2018 dan TA.2019 provinsi se indonesia	website

Jangka Waktu Layanan Informasi Publik

Berpedoman pada Undang Undang KIP, Kementerian dalam Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 26 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengatur jangka waktu pelayanan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID Utama wajib menyampaikan :

1. Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak;
2. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang - undangan;
3. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.



PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Terkait penjelasan dan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017.

Selama tahun 2019 Kemendagri membutuhkan jangka waktu rata-rata 15 hari kerja untuk menyelesaikan permohonan informasi. Dengan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi tercepat adalah 5 hari kerja dan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi terlama mencapai 23 hari kerja.

Hal ini menjadi catatan dan masukan bagi PPID Kemendagri untuk meningkatkan pelayanan informasi publik khususnya dalam hal kecepatan penyelesaian permohonan informasi.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk dapat semaksimal mungkin memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat. Sehingga selain melayani permohonan informasi dan konsultasi secara langsung di kantor, PPID Kementerian Dalam Negeri juga berusaha mengakomodir permohonan dengan tidak memberatkan pemohon informasi dari segi pembiayaan, yaitu dengan layanan Informasi Publik secara tidak langsung melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id.



Berikut hasil rekapitulasi permohonan informasi yang dikabulkan oleh Kemendagri selama tahun 2019

BULAN	JML	TINDAK LANJUT				
		SELESAI	PROSES	TOLAK	DISPOSISI	KEBERATAN
JANUARI	109	109				
FEBRUARI	20	20				
MARET	9	7		2		
APRIL	10	10				
MEI	19	19				
JUNI	10	10				
JULI	17	15		2		
AGUSTUS	7	7				
SEPTEMBER	7	7				
OKTOBER	15	15				
NOVEMBER	26	25		1		
DESEMBER	7	7				
TOTAL	256	251		5		

Selama tahun 2019, PPID Kementerian Dalam Negeri telah melayani 256 permohonan informasi dengan rincian jumlah permohonan informasi yang diterima adalah 251 permohonan informasi dan 5 permohonan informasi ditolak.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak



Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri memiliki hak untuk menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah menolak 5 Permohonan informasi. Berikut data permohonan informasi yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri selama Tahun 2019 :

NO	NAMA	TANGGAL	INFORMASI YANG DIMOHON	ALASAN PENOLAKAN
1	maulana ibna azkiya	7 Maret 2019	Jumlah Komunitas yang ada di Indonesia	Informasi Belum Dikuasai
2	Hendra Rizki Rangkuti	13 Maret 2019	LKPJ LAKIP DAN LPPD KAB PADANG LAWAS 2017, 2018	Kewenangan Badan Publik Lain
3	Firdaus, SE	22 Juli 2019	PPID UTAMA	Informasi Belum Dikuasai/Permohonan Tidak Lengkap
4	M.Erwin Rahman Aulia	25 Juli 2019	Nama orang tua	Informasi Belum Dikuasai/Permohonan Tidak Lengkap
5	Admin Kabupaten Banggai Kepulauan	20 November 2019	Juknis Penamaan Sub Domain Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan	Kewenangan Badan Publik Lain

Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah



Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran untuk mendorong pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pelayanan informasi publik.

Selama tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan 3 kali Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membagi peserta kedalam 3 regional berdasarkan wilayahnya.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda Wilayah Indonesia Bagian Tengah.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2019 di Hotel Swiss-bel Hotel Mangga Besar Jakarta Pusat. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan dimaksud adalah 250 Orang.

Narasumber dan materi rapat pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penerangan di Era Digital yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo;
2. Refleksi 1 dekade implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri , Dr. Drs. Bahtiar, M.Si;
3. Strategi SPBE Pada Era Revolusi Industri 4.0 Smart Government Dalam Smart Nation yang disampaikan oleh Plt. Direktur E-Government Bambang Dwi Anggodo, S.Sos, M.eng, CEH;
4. Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi, Gede Narayana.



Rapat dilaksanakan dengan membuka sesi diskusi setelah pemaparan materi secara panel oleh seluruh narasumber. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan;
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan pengelolaan informasi;
3. Masukan dari pemerintah daerah terhadap Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda khususnya terkait struktur PPID;
4. Usulan penambahan SOP untuk dimasukkan dalam rancangan Perubahan Permendagri Nomor. 3 Tahun 2017.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 Maret 2019 di Hotel Gammara Makasar dengan peserta yang hadir berjumlah 166 orang yang berasal dari 10 Pemerintah Provinsi, 145 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 11 ASN Pusat Penerangan.

Narasumber dan materi rapat pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri;
2. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
3. Komisioner Komisi Informasi Pusat;
4. Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
5. Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri.



Kegiatan rapat tersebut dilaksanakan untuk lebih menggali informasi terkait kendala dan kondisi empiris pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah. Kesimpulan rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat 2 huruf d yang menyebutkan “PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasa” diganti menjadi “PPID Utama dijabat oleh eselon II yang membidangi Komunikasi dan Informatika”;
2. Pasal 15 ayat 3 huruf d yang menyebutkan “PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan” diganti menjadi “PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon II yang membidangi Komunikasi dan Informatika”;
3. Pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan “Surat Keputusan Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasisesuai dengan kewenangannya” ,diganti menjadi “Surat Keputusan Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi ditambah dengan Surat Tugas dapat berfungsi untuk bersidang mewakili Kemendagri dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda Wilayah Indonesia Bagian Barat.



Rapat dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Agustus 2019 di Hotel Golden View Batam dengan peserta sejumlah 188 peserta yang berasal dari perwakilan PPID Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Indonesia Bagian Barat. Narasumber dan materi rapat pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan;

2. Pengelolaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;

3. Penanganan Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;

4. Layanan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Batam yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

5. Inovasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik Pada Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi.

Rapat dilaksanakan dengan membuka sesi diskusi setelah pemaparan materi secara panel oleh seluruh narasumber. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya Keterbukan Informasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan;
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan pengelolaan informasi;
3. Masukan dari pemerintah daerah terhadap Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda khususnya terkait struktur PPID;
4. Usulan penambahan SOP untuk dimasukkan dalam rancangan Perubahan Permendagri Nomor. 3 Tahun 2017.



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi yang tidak puas terhadap tanggapan yang disampaikan oleh PPID dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. PPID Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kementerian Dalam Negeri memiliki Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang

ditugaskan secara khusus untuk menangani sengketa informasi. Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang merupakan bagian dari PPID Kementerian Dalam Negeri kerap berkoordinasi dengan PPID Pembantu apabila terdapat permohonan informasi yang belum ditanggapi. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya permohonan informasi yang belum ditanggapi melewati waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.



Selama tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki keberatan informasi maupun sengketa informasi. Namun demikian untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan Monitorin dan Evaluasi pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri.

10 tahun lebih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan namun pada kenyataannya masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan semangat keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Sejak tahun 2010 PPID Kementerian Dalam Negeri dibentuk, pelayanan informasi publik terus berkembang dan melakukan perbaikan dalam berbagai aspek.

Dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pusat Penerangan akan selalu berkoordinasi dengan PPID Pembantu dari setiap komponen dan unit di Kementerian Dalam Negeri. Dalam beberapa kesempatan terdapat kendala yang telah diidentifikasi untuk kemudian dapat diantisipasi untuk waktu berikutnya:



1. Masih adanya anggapan bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan yang membebani tugas utama komponen dan unit. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman akan pengelolaan pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi. Perubahan nomenklatur dan penyegaran organisasi juga mempengaruhi pelaksanaan pelayanan informasi karena berdampak pada perubahan person in charge yang dibarengi dengan sosialisasi yang harus dimulai dari awal setiap ada pergantian orang dalam
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Utama memiliki tenaga yang diperbantukan untuk melayani Permohonan Informasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan situasi yang menunjukkan perlunya tambahan personil yang secara khusus bertugas melayani permohonan informasi dan melakukan koordinasi-koordinasi yang dibutuhkan demi terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan akuntabel.
3. PPID Pembantu masih belum memahami klasifikasi Daftar Informasi Publik. Selain itu belum tercapainya pemahaman yang baik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sehingga PPID Pembantu cenderung ragu untuk menyampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah memetakan langkah rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :



Melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berdasarkan masukan Pemerintah Daerah dalam rapat yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Hal-hal yang direvisi dalam peraturan tersebut utamanya yang menyangkut struktur kelembagaan PPID di tingkat Kabupaten/Kota yang semula melekat pada jabatan structural Eselon III yang membidangi Pengelolaan informasi, dokumentasi dan kehumasan, menjadi pejabat Eselon II

Menginventarisir permasalahan pada Permendagri No. 3 Tahun 2017, khususnya dalam hal penyediaan SOP dan disesuaikan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki Standar Layanan Informasi Publik.

Melakukan asistensi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada 3 provinsi berdasarkan hasil monev Keterbukaan Informasi tahun 2019, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku Utara.

Mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis android yang dapat diakses melalui telepon genggam. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi website ppid.kemendagri.go.id

Mengembangkan fitur-fitur layanan informasi publik pada aplikasi ppid.kemendagri.go.id. yaitu fitur chatting, fitur unggah dokumen pendukung, template sapaan, pengaturan waktu dan alarm serta fitur-fitur lain yang telah diinventarisir sesuai dengan kebutuhan layanan informasi.